

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan upaya yang dilakukan oleh peneliti untuk mencari perbandingan dan inspirasi baru untuk penelitian selanjutnya. Pada bagian ini peneliti mencantumkan berbagai hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian yang akan dilakukan.

Agnes Anggi Hasian Silaban, Gde Indra Bhaskara (2020), dengan judul penelitian “Tingkat Partisipasi Masyarakat Lokal Dalam Pengembangan Kampung Wisata Kreatif Dago Pojok di Kota Bandung”. Lokasi penelitian dilakukan di Kampung Kreatif Dago Pojok, berada di Jalan Dago Pojok RT 2 RW 3, Kelurahan Dago, Kecamatan Coblong Kota Bandung. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Penelitian ini menggunakan jenis data kualitatif dan kuantitatif. Hasil dari penelitian ini adalah Partisipasi masyarakat lokal di Kampung Wisata Kreatif Dago Pojok berada pada tingkatan paling atas yaitu tingkat pemberdayaan. Tetapi untuk mencapai tingkatan tersebut, partisipasi masyarakat juga berada dalam setiap kategorinya. Kondisi pariwisata di tempat ini sudah cukup memadai.

Atraksi wisata yang terdapat di Kampung Kreatif Dago Pojok sangat beragam yaitu mural, alat music tradisional, dan kampung ini juga merupakan wisata edukasi.

Rega Dwimarta Tilar, Alwin (2022), dengan judul “Partisipasi Masyarakat Dalam Pengembangan Objek Wisata Kawung Tilu Di Desa Cipayung Cikarang Timur Kabupaten Bekasi”. Lokasi penelitian dilakukan di tempat wisata Kawung Tilu Bojong Rangkas Desa Cipayung Kecamatan Cikarang Timur. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Hasil dari penelitian ini adalah Bentuk partisipasi masyarakat masyarakat dalam pengembangan objek wisata Kawung Tilu yang dijelaskan oleh pengelola yaitu masyarakat yang turut berpartisipasi dalam pengembangan objek wisata dapat berkontribusi misalnya dengan membuat penyediaan fasilitas objek wisata. Kendala yang terjadi disebabkan oleh masyarakat yang memiliki kesibukan yang berbeda-beda dalam pekerjaan utamanya sehingga tidak tidak dapat ikut berpartisipasi.

Putu Suryani, Irmayanti Diah Jatiningsih, Edy Semara Putra (2021), dengan judul penelitian “Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Bendungan Misterius sebagai Objek Wisata”. Lokasi penelitian dilakukan di Bendung misterius terletak di Desa Balane, Kabupaten Sigi. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan

dokumentasi. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif. Hasil dari penelitian ini adalah Bendung misterius pada awalnya masih dalam keadaan belum dikelola dan masih alami dan belum banyak diketahui oleh masyarakat luar. Namun setelah menyadari bawasannya bending yang berada di Desa Balane sendiri memiliki potensi pariwisata. Desa Balane membuat ide kreasi di tempat objek wisata tersebut. Dengan adanya partisipasi masyarakat Desa Balane dalam pelaksanaan kerja bakti membangun fasilitas maka program tersebut berjalan dengan baik.

Amare Wondirad (2019), dengan judul penelitian “*Community participation in tourism development as a tool to foster sustainable land and resource use practices in a national park milieu*”. Atau dalam bahasa Indonesia “Partisipasi Masyarakat dalam Pengembangan Pariwisata sebagai Alat untuk Mendorong Praktik Penggunaan Lahan dan Sumber Daya yang Berkelanjutan di Lingkungan Taman Nasional”. Lokasi penelitian dilakukan di Kawasan Dinsho di Taman Nasional Pegunungan Bale, Ethiopia Tenggara. Temuan penelitian mengungkapkan bahwa di Dinsho, partisipasi masyarakat yang masih ada berhubungan dengan kontinum non-partisipasi dimana warga hanya tertipu oleh partisipasi palsu dan tokenistic yang menyebabkan pembagian manfaat yang tidak adil. Berdasarkan temuan studi, para peneliti mempertanyakan bahwa keterlibatan masyarakat dalam pembangunan pariwisata sangat bergantung pada sifat penjaga gerbang dan latar belakang ekonomi

masyarakat. Mereka juga berpendapat bahwa ditempat yang terdapat masyarakat dengan ekonomi lemah dan penjaga gerbang yang manipulatif, memastika partisipasi masyarakat menjadi lebih menantang.

Ayat Ullah (2023), dengan judul penelitian “*Community participation in development programs: Key lessons from the billion trees afforestation project (BTAP)*”. Atau dalam bahasa Indonesia “Partisipasi Masyarakat dalam Program Pembangunan: Pelajaran yang Penting dari Proyek Penghijauan Miliaran Pohon (BTAP)”. Lokasi penelitian di Pakistan. Hasil dari penelitian ini adalah Pemerintah Pakistan melaksanakan kegiatan restorasi lanskap hutan di bawah BTAP. Restorasi lanskap hutan yang berkelanjutan memerlukan partisipasi masyarakat yang tinggi dalam perencanaan dan pelaksanaannya. Hasilnya menunjukkan bahwa mereka yang berpartisipasi dalam BTAP pada tingkat yang lebih tinggi menikmati manfaat yang lebih besar dibandingkan mereka yang berpartisipasi pada tingkat yang lebih rendah.

Tabel 2. 1
Penelitian Terdahulu

No.	Penulis, Tahun, Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan dan Perbedaan
1.	Agnes Anggi Hasian Silaban, Gde Indra Bhaskara (2020) Tingkat Partisipasi Masyarakat Lokal Dalam Pengembangan Kampung Wisata Kreatif Dago Pojok Di Kota Bandung	Partisipasi masyarakat lokal di Kampung Wisata Kreatif Dago Pojok berada pada tingkatan paling atas yaitu tingkat pemberdayaan. Tetapi untuk mencapai tingkatan tersebut, partisipasi masyarakat juga berada dalam setiap kategorinya. Kondisi pariwisata di tempat ini sudah cukup memadai. Atraksi wisata yang terdapat di Kampung Kreatif Dago Pojok sangat beragam yaitu mural, alat music tradisional, dan kampung ini juga merupakan wisata edukasi.	Persamaan dalam penelitian ini adalah sama-sama menggunakan metode penelitian observasi, wawancara, dan dokumentasi sedangkan perbedaan dalam penelitian ini terletak pada tempat penelitian yang berbeda.
2.	Rega Dwimarta Tilar, Alwin (2022) Partisipasi Masyarakat Dalam Pengembangan Objek Wisata Kawung Tilu Di Desa Cipayung Cikarang Timur Kabupaten Bekasi	Bentuk partisipasi masyarakat dalam pengembangan objek wisata Kawung Tilu yang dijelaskan oleh pengelola yaitu masyarakat yang turut berpartisipasi dalam pengembangan objek wisata dapat berkontribusi misalnya dengan membuat penyediaan fasilitas objek wisata. Kendala yang terjadi disebabkan oleh masyarakat yang memiliki kesibukan yang berbeda-beda dalam pekerjaan utamanya sehingga tidak dapat ikut berpartisipasi.	Persamaan dalam penelitian ini adalah sama-sama menggunakan penelitian kualitatif dan teknik pengumpulan data adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Sedangkan perbedaan terletak pada tempat penelitian yang berbeda.

No.	Penulis, Tahun, Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan dan Perbedaan
3.	Putu Suryani, Irmayanti Diah Jatiningsih, Edy Semara Putra (2021) Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Bendungan Misterius Sebagai Objek Wisata	Bendung misterius pada awalnya masih dalam keadaan belum dikelola dan masih alami dan belum banyak diketahui oleh masyarakat luar. Namun setelah menyadari bawasannya bending yang berada di Desa Balane sendiri memiliki potensi pariwisata. Desa Balane membuat ide kreasi di tempat objek wisata tersebut. Dengan adanya partisipasi masyarakat Desa Balane dalam pelaksanaan kerja bakti membangun fasilitas maka program tersebut berjalan dengan baik.	Persamaan dalam penelitian ini adalah sama-sama menggunakan penelitian kualitatif, sedangkan perbedaan dalam penelitian ini terletak pada tempat penelitian yang berbeda.
4.	Amare Wondirad (2019) <i>Community participation in tourism development as a tool to foster sustainable land and resource use practices in a national park milieu</i>	Temuan penelitian mengungkapkan bahwa di Dinsho, partisipasi masyarakat yang masih ada berhubungan dengan kontinum non-partisipasi dimana warga hanya tertipu oleh partisipasi palsu dan tokenistic. Berdasarkan temuan studi, para peneliti mempertanyakan bahwa keterlibatan masyarakat dalam pembangunan pariwisata sangat bergantung pada sifat penjaga gerbang dan latar belakang ekonomi masyarakat. Mereka juga berpendapat bahwa ditempat yang terdapat masyarakat dengan ekonomi lemah dan penjaga gerbang yang manipulatif, memastikan partisipasi masyarakat menjadi lebih menantang.	Persamaan dalam penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang partisipasi masyarakat dalam pengembangan pariwisata. Sedangkan perbedaan terletak pada penelitian ini berfokus pada pariwisata sebagai alat untuk mendorong praktik penggunaan lahan dan sumber daya yang berkelanjutan di lingkungan taman nasional

No.	Penulis, Tahun, Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan dan Perbedaan
5.	Ayat Ullah (2023) <i>Community participation in development programs: Key lessons from the billion trees afforestation project (BTAP)</i>	Pemerintah Pakistan melaksanakan kegiatan restorasi lanskap hutan di bawah BTAP. Restorasi lanskap hutan yang berkelanjutan memerlukan partisipasi masyarakat yang tinggi dalam perencanaan dan pelaksanaannya. Hasilnya menunjukkan bahwa mereka yang berpartisipasi dalam BTAP pada tingkat yang lebih tinggi menikmati manfaat yang lebih besar dibandingkan mereka yang berpartisipasi pada tingkat yang lebih rendah.	Persamaan dalam penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang partisipasi masyarakat. Sedangkan perbedaan terletak pada penelitian ini berfokus pada partisipasi masyarakat dalam program pembangunan.

Berdasarkan uraian yang mengacu pada penelitian terdahulu di atas, kemudian dibandingkan dengan rancangan penelitian ini untuk memenuhi kebaharuan dan menentukan dimanakah posisi dari penelitian ini, maka dari beberapa penelitian yang diambil untuk dijadikan bahan tinjauan penelitian terdahulu yakni memiliki kesamaan tema mengenai partisipasi masyarakat dalam pengembangan destinasi wisata. Sedangkan, nilai kebaharuan dari penelitian ini terletak pada fokus penelitian yang digunakan dalam menganalisis dan menginterpretasikan Partisipasi Masyarakat dengan mengadopsi teori Meronda M (2021) sebagai pisau analisisnya. Dengan demikian, nantinya dapat dirumuskan partisipasi masyarakat dalam pengembangan Kampoeng Cyber Kota Blitar sebagai destinasi wisata edukasi. Selain itu obyek dan lokasi penelitian juga menjadikan pembeda dalam penelitian ini.

2.2 Administrasi Publik

2.2.1 Terminologi Administrasi Publik

Administrasi publik atau administrasi negara adalah suatu bahasan ilmu sosial yang mempelajari tiga elemen penting dalam kehidupan bernegara yaitu meliputi lembaga legislative, yudikatif, dan eksekutif serta hal-hal yang berkaitan dengan publik. Menurut Dwight Waldo dikutip Syafei (2003:33) Administrasi Publik adalah manajemen dan organisasi dari manusia dan peralatannya guna mencapai tujuan pemerintah. Administrasi Negara merupakan segala proses baik yang dilakukan organisasi maupun perseorangan yang berkaitan dengan penerapan atau pelaksanaan hukum dan peraturan yang dilakukan oleh badan legislatif, eksekutif, dan peradilan George J. Gordon dikutip Syafei (2003:33).

Sedangkan menurut Chandler dan Plano dalam Harbani Pasolong (2010:7) Administrasi Publik adalah proses dimana sumber daya personal publik diorganisir dan dikoordinasikan untuk memformulasikan, mengimplementasikan, dan mengelola (manage) keputusan-keputusan dalam kebijakan publik. Menurut Nicholas dalam Harbani Pasolong (2010:8) Administrasi Publik adalah suatu kombinasi yang kompleks antara teori dan praktek, dengan tujuan

mempromosi pemahaman terhadap pemerintah dalam hubungannya dengan masyarakat yang diperintah, dan juga mendorong kebijakan publik agar lebih *responsive* terhadap kebutuhan sosial. Administrasi publik adalah kerja sama yang dilakukan oleh sekelompok orang atau lembaga untuk menjalankan tugas-tugas pemerintahan guna memenuhi kebutuhan masyarakat secara efisien dan efektif menurut Harbani Pasolong (2010:8).

Berdasarkan beberapa penjelasan pengertian diatas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa Administrasi Publik adalah suatu manajemen atau organisasi yang dikoordinir untuk memformulasikan, mengimplementasikan, dan mengelola (manage) keputusan-keputusan dalam kebijakan publik yang berkaitan dengan pelaksanaan hukum dan peraturan yang dilakukan oleh badan legislatif, eksekutif, dan peradilan.

Terminologi publik administration ini berasal dari Amerika Serikat dan Inggris pada mulanya diterjemahkan menjadi administrasi publik. Pada dahulu orang-orang menggunakan istilah ilmu pemerintahan untuk menyebut subjek ini, namun perlu diketahui bahwa ilmu pemerintahan sebenarnya tidak sama dengan administrasi publik. Istilah ilmu pemerintahan merupakan terjemahan yang dianggap setara (dengan arti yang sama) dengan istilah Belanda “bestuurskunde, bestuurswetenschap atau betuursleer”. Istilah ini

dimasuk ke Indonesia dari daratan Eropa Barat pada masa penjajahan Belanda. Jika ditelusuri lebih jauh, kita juga dapat menemukan istilah dalam bahasa Jerman yang mengacu pada subjek yang sama, yaitu *verwaltungslehre*. Jika masyarakat menggunakan konsep analisis *structural-fungsional* dan konsep kebudayaan, maka mereka tidak akan mampu menetapkan secara pasti batasan-batasan administrasi publik. Konsep analisis *struktural-fungsional* menitikberatkan pada pola-pola pengalaman manusia yang bersifat teratur atau teratur (*universal*), sedangkan konsep kebudayaan menitikberatkan pada keragaman pengalaman manusia (berbeda antara ruang dan waktu).

2.2.2 Paradigma Administrasi Publik

Paradigma suatu ilmu akan berubah jika paradigme tersebut mengalami krisis, tidak mempunyai kewenangan, tidak lagi mendapat dukungan, atau dianggap tidak mampu mengatasi suatu permasalahan keilmuan (*anomaly*), sampai-sampai paradigme tersebut digantikan oleh model baru yang muncul nanti.

Dalam bidang ilmu administrasi publik, pergeseran paradigma ini telah terjadi berkali-kali. Hal ini terlihat pada pergantian cara pandang ilmu administrasi publik terhadap bidang kajian ilmu administrasi publik. Administrasi publik sebagai suatu disiplin ilmu

telah mengalami perkembangan yang kompleks. Literatur menggambarkan rangkaian perkembangan administrasi publik ini sebagai perubahan paradigma. Nicholas Henry (2013) mengidentifikasikan lima paradigma dalam administrasi publik:

1. Paradigma 1 : Dikotomi politik/administrasi (1990-1926)

Dalam bukunya yang inovatif, politik dan administrasi, yang diterbitkan pada tahun 1900, Frank J. Goodnow menyatakan bahwa ada "dua fungsi pemerintahan yang berbeda", yang ia identifikasikan dengan judul buku besarnya. "politik," tulis Goodnow, "berhubungan dengan kebijakan atau ekspresi kehendak negara," sedangkan administrasi "berhubungan dengan pelaksanaan kebijakan-kebijakan tersebut." Pernyataan Goodnow yang menyatakan bahwa politisi terpilih dan pejabat publik yang ditunjuk melakukan hal yang berbeda pada akhirnya dicap oleh para akademisi sebagai dikotomi politik/administrasi.

2. Paradigma 2 : Asas administrasi publik (1927-1937)

Pada tahun 1927, buku W. F. Willoughby, prinsip-prinsip administrasi publik, muncul sebagai teks lengkap kedua di lapangan. judulnya saja menunjukkan dorongan baru administrasi publik: bahwa administrator publik akan efektif jika mereka mempelajari dan menerapkan prinsip-prinsip ilmiah administrasi.

Kotak teks Willoughby mencerminkan tren intelektual yang meliputi seluruh teori manajemen, dan administrasi publik tidak terkecuali. dalam hal ini, ketertarikan para ahli terhadap prinsip-prinsip administrasi sangat kontras dengan dikotomi politik/administrasi yang masih berlaku, yang merupakan hal unik dalam administrasi publik.

3. Paradigma 3 : Administrasi publik sebagai ilmu politik (1950-1970)

Sebagai akibat dari hal-hal ini dan kekhawatiran terkait lainnya, para ahli administrasi publik kembali ke rahim yang hangat dan ramah (atau begitulah menurut mereka) disiplin ilmu utama, yaitu ilmu politik. beberapa ilmuwan politik, bagaimanapun, mencoba membenamkan keturunan mereka yang "aneh dan tidak wajar" di dalamnya. Paradigma 3 dimulai sebagai upaya membangun kembali hubungan antara administrasi publik dan ilmu politik. tapi ada masalah.

4. Paradigma 4 : Administrasi publik sebagai manajemen (1956-1970)

Sebagian karena kewarganegaraan kelas dua mereka di sejumlah departemen ilmu politik, beberapa ahli administrasi publik mulai mencari alternatif. mereka menemukannya dalam ilmu manajemen, kadang-kadang disebut ilmu administrasi atau

manajemen generik, yang berpendapat bahwa sektor, budaya, lembaga, misi, apa pun, tidak banyak berpengaruh terhadap administrasi yang efisien dan efektif, dan bahwa "kumpulan pengetahuan" adalah statistik, ekonomi, akuntansi, riset operasi, dan teori organisasi sering disebut-sebut sebagai "keberadaan yang umum dalam bidang administrasi"

5. Paradigma 5 : Administrasi publik sebagai administrasi publik (1970-sekarang)

"Administrasi publik sebagai administrasi publik" mengacu pada keberhasilan administrasi publik dalam memisahkan ilmu politik dan manajemen, dan kemunculannya sebagai bidang studi dan praktik yang otonom.

6. Paradigma 6 : Pemerintahan (1990 – sekarang)

"Perubahan besar dalam teknologi, komunikasi, ekonomi global, dan kekuasaan serta peran pemerintah menyebabkan penilaian mandiri dalam sektor bisnis, nirlaba, dan pemerintah. peran sektor-sektor tersebut berubah".

Ketiga paradigma yang dicetuskan oleh Denhardt dan Denhardt (2007) ini membagi pola manajemen organisasi publik dalam memberikan pelayanan menjadi tiga paradigma yaitu *Old Public Administration* (OPA), *New Public Management* (NPM), dan *New Public Service* (NPS).

a. *Old Public Administration* (OPA)

Paradigma *Old Public Administration* (OPA) pertama kali diperkenalkan oleh Presiden Amerika Serikat yaitu Woodrow Wilson. Ia berpendapat bahwa bidang administrasi publik sama dengan bidang politik. Tujuan dari *Old Public Administration* (OPA) adalah melaksanakan kebijakan dan memberikan pelayanan yang pelaksanaannya bersifat netral, professional, dan berkaitan langsung dengan tujuan yang telah ditetapkan.

b. *New Public Management* (NPM)

Muncul konsep manajemen publik baru yang disebut *New Public Management* (NPM) dalam paradigma Denhardt dan Denhardt (2007). NPM telah terbukti menjadi solusi atas buruknya kinerja penyelenggaraan pelayanan pemerintah. Tugas dan fungsi birokrasi disusun dalam ranah administrative sehingga dapat dilaksanakan secara efisien sesuai dengan prinsip administrative. Upaya tersebut akan diwujudkan dengan menyuntikkan jiwa kewirausahaan pada aparatur negara. Salah satu bentuknya adalah menciptakan sistem yang lebih efisien dan efektif dalam memberikan layanan. Konsep *New Public Management* (NPM) memandang peran pemerintah bukan lagi sebagai pendayung, melainkan sebagai pengarah. Denhardt dan Denhardt (2007) menyatakan bahwa peran pemerintah adalah lebih responsive terhadap kebutuhan pelanggan.

c. *New Public Service* (NPS)

Denhardt dan Denhardt (2007) memperkenalkan paradigma baru yang disebut *New Public Service* (NPS). Konsep dasar *New Public Service* (NPS) adalah memulihkan dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan. Sebelumnya, pemerintah merupakan tokoh sentral, partai politik yang lebih mengetahui kebutuhan masyarakat itu sendiri. Faktanya, permasalahan yang selalu ada adalah terputusnya saluran komunikasi antara lembaga perwakilan dan pemerintah serta masyarakatnya.

2.3 Pembangunan

Pembangunan merupakan suatu proses sejarah yang berlangsung terus menerus sehingga tidak pernah berhenti. Pembangunan tidak hanya melibatkan perubahan struktur fisik dan material, tetapi juga perubahan sikap sosial. Pembangunan harus mampu menggerakkan manusia melampaui prioritas aspek material kehidupan (Jamaludin, 2016).

Pada dasarnya ada tiga arah strategi pemberdayaan masyarakat yang pertama adalah dukungan dan pemberdayaan masyarakat. Kedua, memperkuat otonomi dan pendelegasian wewenang dalam pengelolaan pembangunan sehingga mendorong partisipasi masyarakat. Ketiga, modernisasi dengan mempertajam arah perubahan struktur sosial ekonomi, kesehatan, budaya dan politik yang dihasilkan dari partisipasi

masyarakat (Mardikanto & Poerwoko, 2012). Menurut Weber, dalam Jamaludin (2016), aspek mendasar dari modernisasi adalah demokratisasi, sekularisasi, industrialisasi, urbanisasi, pendidikan, dan peran media massa yang semuanya merupakan satu kesatuan dan tidak dapat dipisahkan. Partisipasi atau peran masyarakat dalam pembangunan adalah mewujudkan kemauan dan kemampuan anggota masyarakat untuk berkorban dan memberikan kontribusi terhadap pelaksanaan program/proyek yang dilaksanakan (Adisasmita, 2006:34).

Tjokrominoto dalam Suryono (2010) menyimpulkan beberapa makna pembangunan dalam perspektif diakronis (pembangunan menurut tahap pertumbuhan dan periode waktu yang dasarnya tidak jelas) yakni:

- a) Pembangunan sebagai proses perubahan sosial menuju tatanan kehidupan masyarakat yang lebih baik
- b) Pembangunan sebagai upaya manusia yang sadar, terencana, dan melembaga
- c) Pembangunan sebagai proses sosial yang bebas nilai
- d) Pembangunan adalah ideology yang memperoleh nilai transenden ciri-ciri dan konsep
- e) Pembangunan sebagai konsep yang syarat nilai (value loaded) menyangkut proses pencapaian nilai yang dianut suatu bangsa secara makin meningkat

- f) Pembangunan menjadi culture specific, situation specific, dan time specific

Pembangunan merupakan suatu realitas fisik dan tekad masyarakat untuk berusaha semaksimal mungkin melalui kombinasi proses sosial, ekonomi dan kelembagaan untuk mencapai kehidupan yang lebih baik. Untuk mencapai kehidupan yang lebih baik setiap masyarakat harus memiliki setidaknya tiga tujuan utama (Todaro, 2000:28) yaitu :

- 1) Peningkatan ketersediaan dan perluasan distribusi berbagai jenis kebutuhan dasar, seperti pangan, sandang, papan, serta perlindungan kesehatan dan keselamatan
- 2) Peningkatan taraf hidup tidak hanya berupa peningkatan pendapatan, tetapi juga mencakup peningkatan penyediaan kesempatan kerja, peningkatan kualitas pendidikan, dan perhatian yang lebih besar terhadap nilai-nilai budaya dan kemanusiaan. Semuanya tidak hanya meningkatkan kesejahteraan materi, tetapi juga meningkatkan identitas individu dan bangsa yang terkena dampak
- 3) Dengan memperluas pilihan ekonomi dan sosial setiap individu dan bangsa secara keseluruhan, melalui pembebasan dari keterikatan dan ketergantungan.

2.4 Partisipasi Masyarakat

Secara etimologi, partisipasi berasal dari bahasa Inggris “participation” yang artinya mengambil bagian/keikutsertaan. Sedangkan dalam kamus lengkap Bahasa Indonesia “partisipasi” berarti: hal turut berperan serta dalam suatu kegiatan keikutsertaan. Cohen dan Uphoff dalam Dwiningrum (2015: 51), partisipasi merupakan keterlibatan masyarakat dalam proses pembuatan keputusan, pelaksanaan program, memperoleh kemanfaatan dan mengevaluasi.

Tujuan partisipasi masyarakat dapat berubah setiap waktu, tergantung lingkungan. Menurut Kelly dalam Adiyoso (2009), awalnya keterlibatan ini bertujuan untuk memberdayakan masyarakat untuk mengentaskan kemiskinan di negara-negara berkembang. Tujuan utama partisipasi adalah untuk melibatkan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan, untuk mempromosikan dan melibatkan masyarakat, dan untuk mencapai tujuan (Sanoff, 2000).

Awal perencanaan, penyusunan rencana, pelaksanaan proyek, pengelolaan dan pembagian hasilnya masyarakat setempat dilibatkan sebagai partisipasi yang mutlak sehingga harus ditegaskan dalam draft rencana. (Damanik & Weber, 2006:106) menyebutkan partisipasi harus memberdayakan masyarakat untuk menjadi salah satu penentu tahapan-tahapan proyek, namun sekaligus juga membelajarkan mereka untuk

memiliki tanggungjawab maupun komitmen dan hasil maupun resiko yang mungkin dicapai melalui proyek. Proses partisipasi bertitik tolak untuk memandirikan masyarakat agar dapat meningkatkan taraf hidupnya, menggunakan dan mengakses sumberdaya setempat sebaik mungkin, baik sumberdaya alam maupun sumberdaya manusia.

Berdasarkan pendapat dari berbagai ahli, dapat disimpulkan bahwa partisipasi masyarakat merupakan upaya yang dilakukan oleh anggota masyarakat untuk berkontribusi dalam program/proyek yang sedang dilaksanakana. Partisipasi masyarakat juga berguna agar masyarakat memiliki tanggungjawab dan komitmen dalam pelaksanaan suatu proyek, sehingga masyarakat dapat meningkatkan taraf hidupnya dengan mengakses sumberdaya alam maupun sumberdaya manusia.

Melibatkan masyarakat lokal dalam perencanaan pariwisata adalah kunci untuk mendukung pembangunan berkelanjutan. Ini mencakup pelibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan, pelatihan, dan memberikan manfaat ekonomi kepada masyarakat setempat. Contoh dari aspek “Partisipasi Masyarakat” dalam industri pariwisata adalah:

- a. Pengambilan Keputusan Bersama. Melibatkan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan bersama mengenai pengembangan pariwisata.

- b. Pelatihan dan Pendidikan. Masyarakat diberikan pelatihan dan pendidikan terakit industry pariwisata.
- c. Pemberian Manfaat Ekonomi. Upaya tersebut dibuat guna untuk memastikan masyarakat bahwa sebagian manfaat ekonomi yang dihasilkan dari pariwisata mengalir ke masyarakat.
- d. Pertumbuhan Bisnis Lokal. Mendukung bisnis lokal yang dimiliki oleh masyarakat untuk mempromosikan partisipasi ekonomi mereka.
- e. Warisan Budaya dan Tradisi. Mempromosikan warisan budaya dan tradisi masyarakat agar budaya dan nilai-nilai lokal tetap dilestarikan.
- f. Pemberdayaan Wanita. Mendukung para wanita dalam kegiatan industry pariwisata.
- g. Kemitraan dengan Komunitas. Membangun kemitraan dengan destinasi wisata, pemerintah dan komunitas.
- h. Konservasi Lingkungan. Melibatkan semua masyarakat untuk upaya melestarikan lingkungan.
- i. Pendanaan Proyek Sosial. Mengalokasikan sebagian pendapatan pariwisata digunakan untuk mendukung proyek sosial.

2.4.1 Bentuk – Bentuk Partisipasi Masyarakat

Partisipasi dapat dibagi kedalam beberapa bentuk. Menurut (Dwiningrum, 2015:58-59) menyebutkan bahwa partisipasi

masyarakat ditinjau dari bentuknya dibedakan menjadi dua bagian, yaitu :

a. Partisipasi secara fisik

Partisipasi ini dapat berupa organisasi pendidikan atau bisnis. Contohnya termasuk pendirian perusahaan sekolah, beasiswa, dan bahkan pembangunan gedung serta bentuk dukungan pemerintah lainnya terhadap masyarakat.

b. Partisipasi secara non fisik

Partisipasi yang melibatkan masyarakat dalam penetapan tujuan. Misalnya, kebutuhan untuk menempuh pendidikan nasional dan semakin besarnya keinginan untuk menambah wawasan dan pengetahuan masyarakat melalui pendidikan. Oleh karena itu, pemerintah tidak kesulitan dalam memberi tahu masyarakat cara bersekolah.

Sedangkan Darvis dalam jurnal yang ditulis oleh Anthonius Ibori (2013:4) berpendapat bahwa partisipasi masyarakat dibagi kedalam beberapa bentuk, yaitu:

- a) Partisipasi berupa pemikiran, gagasan, atau ekspresi
- b) Partisipasi berupa tenaga
- c) Partisipasi berupa pikiran dan juga tenaga

- d) Partisipasi berupa keahlian
- e) Partisipasi berupa barang
- f) Partisipasi berupa uang

Berdasarkan pendapat diatas maka dapat disimpulkan partisipasi masyarakat digolongkan menjadi beberapa bentuk seperti partisipasi dalam bentuk pikiran, partisipasi dalam bentuk tenaga, partisipasi dalam bentuk keahlian, partisipasi dalam bentuk barang atau uang.

2.4.2 Pendekatan Partisipasi Masyarakat

Menurut Club du Sahel dalam Mikkelsen (2003), beberapa pendekatan untuk memajukan partisipasi masyarakat yaitu:

- 1) Pendekatan pasif, pelatihan dan informasi adalah pendekatan yang beranggapan bahwa pihak eksternal lebih menguasai pengetahuan, teknologi, keterampilan, dan sumber daya. Dengan demikian partisipasi tersebut memberikan komunikasi satu arah, dari atas ke bawah dan hubungan pihak eksternal dan masyarakat bersifat vertical.
- 2) Pendekatan partisipasi aktif yaitu memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk berinteraksi secara intensif dengan para petugas eksternal, contohnya pelatihan dan kunjungan.

- 3) Pendekatan partisipatif adalah keterikatan masyarakat atau individu diberikan kesempatan untuk melakukan pembangunan dan diberikan pilihan terikat pada sesuatu kegiatan dan bertanggung jawab atas kegiatan tersebut.
- 4) Pendekatan dengan partisipasi setempat yaitu pendekatan dengan mencerminkan kegiatan pembangunan atas dasar keputusan yang diambil oleh masyarakat setempat.

2.4.3 Indikator Partisipasi Masyarakat

Terkait dengan bentuk partisipasi masyarakat, Meronda M (2021:146) mengatakan bahwa ada empat bentuk indikator yang mencakup teori inti partisipasi masyarakat dalam perannya, yaitu:

- 1) Partisipasi dalam pengambilan keputusan

Partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan di wilayahnya perlu ditumbuhkan melalui forum yang memungkinkan masyarakat berpartisipasi langsung dalam proses pengambilan keputusan terhadap program yang telah disepakati bersama di wilayah setempat. Perencanaan merupakan keputusan untuk waktu yang akan datang, apa yang dilakukan, bilamana akan melakukan dan siapa yang melakukan. Adapun urutan bagian-bagian perencanaan yang merupakan sistematis berfikir dalam

perencanaan yang meliputi: hasil akhir (*the ends*) spesifikasi dari tujuan-tujuan atau sasaran-sasaran, target perencanaan. Disini ditentukan apa yang ingin dicapai dan bila mana kita akan mencapainya. Alat-alat (*the means*) meliputi pemilihan dari kebijaksanaan, strategi, prosedur, dan prakteknya. Disini menentukan bagaimana rencana. Sumber-sumber (*the resources*) meliputi kuantitas, pendapatan, dan pengalokasian beberapa sumber antara lain: tenaga kerja, keuangan, material, tanah, dan sebagainya. Pelaksanaan (*implementation*) menentukan prosedur pengambilan keputusan dan cara mengorganisasikannya sehingga rencana tersebut dapat dilaksanakan. Pengawasan (*control*) menentukan prosedur yang akan dilaksanakan dalam menemukan kesalahan, kegagalan dari pada rencana dan untuk mencegah atau memperbaiki kesalahan untuk selanjutnya.

2) Partisipasi dalam pelaksanaan program yang dibuat

Diartikan bahwa dalam pelaksanaan kegiatan atau program yang dibuat, merupakan sebuah lanjutan rencana yang telah disepakati sebelumnya. Dalam hal ini dapat dijelaskan bahwa untuk partisipasi masyarakat dapat dilakukan melalui keikutsertaan masyarakat dalam memberikan kontribusi guna menunjang pelaksanaan program yang dibuat.

3) Partisipasi dalam pemantauan dan evaluasi

Bentuk partisipasi masyarakat dalam memantau dan mengevaluasi program dan kegiatan pembangunan sangat diperlukan, guna mengetahui apakah tujuan yang dicapai sudah sesuai dengan harapan. Selain itu juga untuk memperoleh umpan baik tentang masalah/kendala yang muncul dalam pelaksanaan kegiatan yang sedang dilaksanakan.

4) Partisipasi dalam pemanfaatan hasil

Seringkali masyarakat tidak memahami manfaat dari setiap program yang dilaksanakan secara langsung, sehingga hasil dari program yang dibuat menjadi sia-sia. Dengan demikian, perlu adanya partisipasi masyarakat dengan kemauan dan kesukarelaan untuk memanfaatkan hasil, misalnya: memanfaatkan hasil dari sebuah program yang dibuat dengan maksimal.

2.4.4 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Partisipasi Masyarakat

Najib (2005) (dalam Huraerah 2008:108) memandang keberhasilan partisipasi masyarakat dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya:

- 1) Siapa penggagas partisipasi: apakah pemerintah pusat, pemerintah daerah atau LSM. *Non – government stakeholders* berpeluang untuk lebih lanjut.
- 2) Untuk kepentingan siapa partisipasi itu dilaksanakan: apakah untuk kepentingan pemerintah atau untuk masyarakat. Jika untuk kepentingan warga maka program kemiskinan dengan pendekatan partisipasi akan lebih berlanjut.
- 3) Siapa yang memegang kendali: apakah pemerintah pusat, pemerintah daerah, atau lembaga donor. Jika pemerintah daerah atau LSM yang memegang kendali cenderung lebih berhasil, karena pemerintah daerah atau LSM cenderung lebih mengetahui permasalahan, kondisi, dan kebutuhan daerah atau masyarakatnya dibanding pihak luar.
- 4) Hubungan pemerintah dengan masyarakat: apakah ada kepercayaan dari masyarakat dari masyarakat terhadap pemerintahannya, jika hubungan ini baik, partisipasi akan lebih mudah dilaksanakan.
- 5) Kultural: daerah yang masyarakatnya memiliki tradisi dalam berpartisipasi (proses pengambilan keputusan melalui musyawarah) cenderung lebih mudah dan berlanjut.
- 6) Politik: pemerintahan yang stabil serta menganut sistem yang transparan, menghargai keberagaman dan demokratis.

- 7) Legalitas: tersedianya (diupayakan) regulasi yang menjamin partisipasi warga dalam pengelolaan pembangunan (terintegrasi dalam sistem pemerintahan di daerah).
- 8) Ekonomi: adanya mekanisme yang menyediakan akses bagi warga miskin untuk terlibat atau memastikan bahwa mereka akan memperoleh “manfaat” (langsung maupun tidak langsung) setelah berpartisipasi.
- 9) Kepemimpinan: adanya kepemimpinan yang disegani dan memiliki komitmen yang disegani dan memiliki komitmen untuk mendorong serta melaksanakan partisipasi, dapat dari kalangan pemerintah, LSM, masyarakat itu sendiri atau tokoh masyarakat.
- 10) Waktu: penerapan partisipasi tidak hanya sesaat, tetapi ditempatkan pada kurun waktu yang cukup lama.
- 11) Tersedianya jaringan yang menghubungkan antara warga masyarakat dan pemerintah (forum warga).

Menurut Watson (Soetomo, 2008:214), faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat adalah:

1) Faktor internal

Menurut Slamet (2003:137-143) faktor-faktor internal adalah berasal dalam kelompok masyarakat sendiri, yaitu individu-individu dan kesatuan kelompok di dalamnya. Tingkah laku individu berhubungan

erat atau ditentukan oleh ciri-ciri sosiologis seperti umur, jenis kelamin, pengetahuan, pekerjaan atau penghasilan. Secara teoritis, terdapat hubungan antara ciri-ciri individu dengan tingkat partisipasi seperti usia, tingkat pendidikan, jenis pekerjaan, lamanya menjadi anggota masyarakat, besarnya pendapatan, keterlibatan dalam kegiatan pembangunan akan sangat berpengaruh pada partisipasi.

2) Faktor eksternal

Menurut Sunarti (dalam jurnal tata loka, 2003:9), faktor-faktor eksternal ini dapat dikatakan petaruh (stakeholder), yaitu semua pihak yang berkepentingan dan mempunyai pengaruh terhadap program ini. Petaruh kunci adalah siapa yang mempunyai pengaruh yang sangat signifikan, atau mempunyai posisi penting guna kesuksesan program.

2.5 Pengembangan Destinasi Wisata

Destinasi pariwisata menurut Undang-Undang RI No. 10 Tahun 2009 tentang kepariwisataan pasal 1 angka 6 tentang Kepariwisataaan dikenal juga dengan daerah tujuan wisata didefinisikan sebagai kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administrative yang didalamnya terdapat daya tarik wisata, fasilitas umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya kepariwisataan.

Destinasi wisata adalah suatu kawasan atau kawasan geografis tersendiri dalam satu atau lebih wilayah administratif yang mempunyai unsur daya tarik wisata. Menurut Darsoprajitno (2002), perbedaan unsur alam, budaya masyarakat, dan unsur binaan masing-masing belahan bumi mendorong individu atau kelompok masyarakat untuk mengunjunginya dan dikembangkan untuk tujuan pariwisata dan disebut daya tarik wisata. Sumber daya pariwisata terdiri dari lingkungan alam, masyarakat, dan bangunan. Diantara ketiga unsur yang dapat dikembangkan secara khusus untuk ditetapkan sebagai daya tarik wisata khusus.

Pengelolaan destinasi wisata merupakan pendekatan terpadu yang sangat penting dalam industry pariwisata. Tujuannya adalah untuk memastikan destinasi tersebut berkelanjutan dan memberikan manfaat maksimal bagi seluruh pemangku kepentingan, termasuk pengunjung, komunitas lokal, dan lingkungan. Pengelolaan destinasi wisata mencakup berbagai aspek seperti perencanaan, pemantauan, pengembangan, dan pemeliharaan destinasi wisata. Langkah pertama dalam pengelolaan destinasi wisata adalah perencanaan. Sebuah destinasi membutuhkan visi jangka panjang untuk memandu perkembangannya. Pemantauan dan pengaturan destinasi wisata penting untuk menjaga kualitas pengalaman wisata dan melindungi lingkungan. Pengelolaan destinasi juga harus mempertimbangkan prinsip keberlanjutan. Pembangunan berkelanjutan di suatu destinasi melibatkan pemeliharaan keseimbangan antara

pertumbuhan ekonomi, perlindungan lingkungan, dan kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan perencanaan yang matang, pemantauan yang ketat, pembangunan berkelanjutan, partisipasi dan evaluasi masyarakat, destinasi dapat berkembang secara berkelanjutan dan memberikan manfaat jangka panjang bagi seluruh pemangku kepentingan.

2.6 Wisata Edukasi

Wisata ini merupakan kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang yang dengan tujuan rekreasi dan liburan, serta mencakup kegiatan pembelajaran yang dapat diperoleh sebagai pengalaman di tempat tujuan. Menurut Erlangga (2017) wisata edukasi dalam pengembangannya di bagi menjadi 2 bagian yaitu:

a) Konsep wisata edukasi

Meskipun pendidikan dan pariwisata merupakan dua hal yang berbeda, namun keduanya dapat berjalan secara sinergis dan saling melengkapi. Proses pendidikan yang dilakukan dalam kegiatan kepariwisataan adalah metode pembelajaran aktif dan kreatif serta metode pembelajaran alternatif yang efektif. Kegiatan wisata edukasi dapat menjadi salah satu cara untuk mensosialisasikan dan meningkatkan rasa bangga dan cinta terhadap budaya dan bangsa. Wisata edukasi merupakan suatu kegiatan wisata yang dilakukan oleh

wisatawan yang tujuan utamanya adalah memperoleh pendidikan atau pembelajaran di tempat tujuan yang ingin dikunjunginya.

b) Aktivitas pariwisata edukasi

Wisata edukasi mempunyai ciri-ciri yang membedakannya dengan kegiatan wisata lainnya. Kegiatan wisata edukasi meliputi konferensi, kajian, pertukaran pelajar nasional dan internasional, kunjungan sekolah, sekolah bahasa dan studi wisata yang diselenggarakan secara resmi dan informal untuk tujuan wisata alam dan buatan.

2.7 Daya Tarik Wisata

Dalam kegiatan wisata ada perpindahan manusia dari tempat tinggalnya ke suatu tempat tujuan wisata atau daerah tujuan wisata, merupakan kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administratif yang didalamnya terdapat daya tarik wisata, fasilitas umum, fasilitas wisata, aksesibilitas serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya kepariwisataan. Dengan demikian, daya tarik wisata menjadi salah satu faktor yang menentukan dan membentuk suatu daerah sebagai daerah tujuan wisata.

Setiap destinasi wisata mempunyai daya tarik yang berbeda-beda tergantung kemampuan dan kemungkinannya. Di bawah ini adalah jenis-jenis daya tarik wisata yang biasa ditampilkan di destinasi wisata :

- a) Daya tarik wisata alam, segala bentuk yang dimiliki oleh alam, misalnya: pegunungan, pantai, laut, sungai, air terjun, danau, hutan, sungai.
- b) Daya tarik wisata buatan, segala bentuk yang dibuat oleh manusia, meliputi Daya tarik wisata budaya misalnya: wayang, tarian, lagu, upacara adat. Daya tarik wisata yang merupakan hasil karya cipta, misalnya: seni pahat, lukisan, ukir.

Dalam peranannya yang penting, daya tarik wisata harus dirancang, dibangun dan dikelola secara professional untuk menarik wisatawan. Membangun suatu objek wisata harus dirancang sesuai standar tertentu. Faktor pengadaan (*supply*) merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi layak atau tidaknya suatu objek wisata untuk dikunjungi. Menurut Pearce dalam Santoso (2006) meliputi :

1) Atraksi

Atraksi atau daya tarik wisata dapat menarik kedatangan wisatawan, dan kedatangannya dimungkinkan oleh transportasi, akomodasi, dan fasilitator perjalanan wisata lainnya. Dengan bertambahnya jumlah kunjungan wisatawan maka sifat dan fungsi berbagai unsur tersebut juga dapat berubah.

2) Transportasi

Perkembangan transportasi mempengaruhi arus wisatawan yang selanjutnya mempengaruhi perkembangan fasilitas akomodasi. Selain itu, perkembangan teknologi transportasi juga mempengaruhi fleksibilitas arah pergerakan.

3) Akomodasi

Fasilitas penginapan dapat dibedakan antara yang digunakan untuk keperluan umum (hotel, tempat berkemah, mothel) dan yang diadakan khusus perorangan untuk menampung keluarga, teman, atau perkumpulan tertentu.

4) Pengaduan fasilitas pelayanan

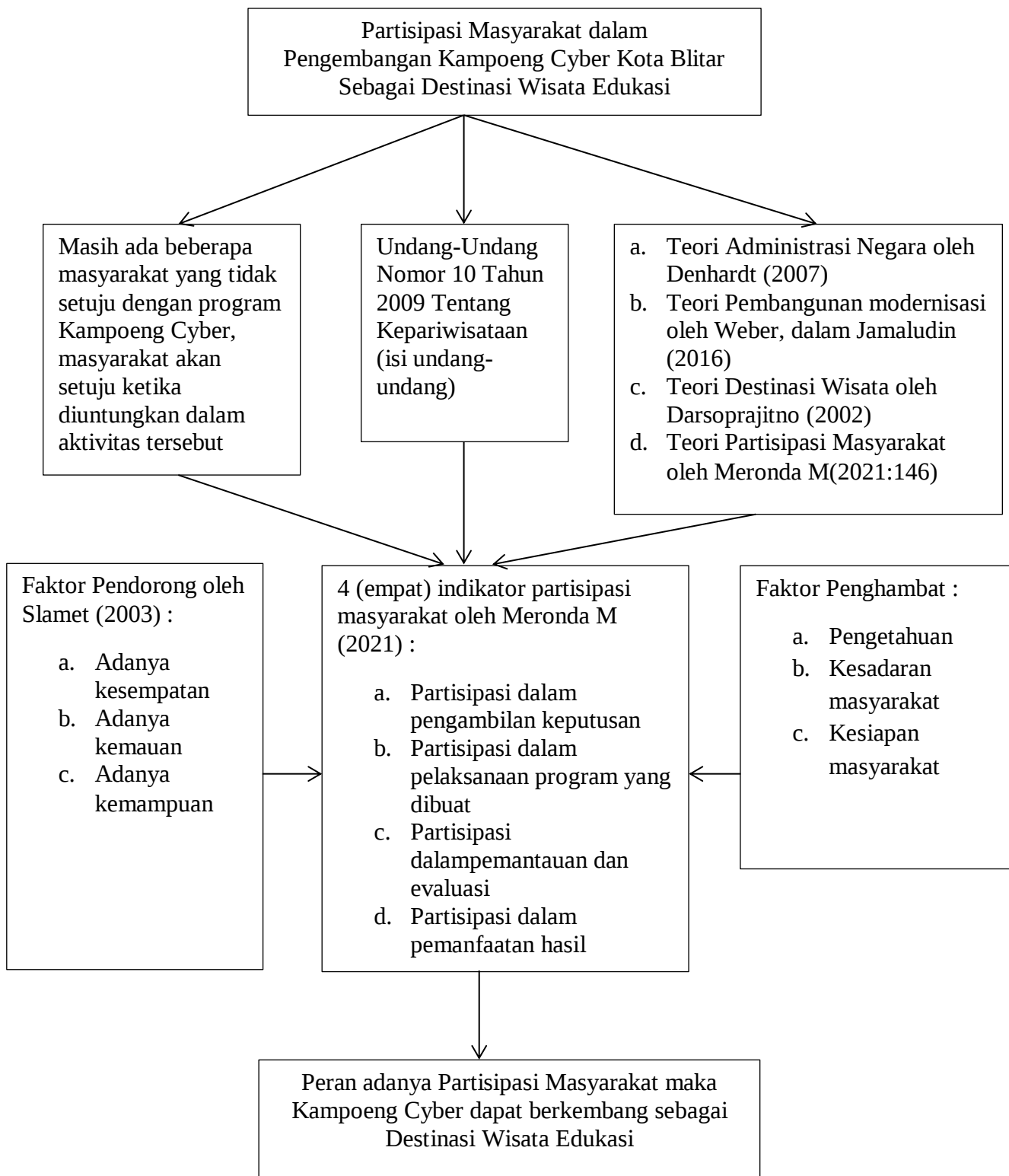
Penyediaan fasilitas dan pelayanan makin berkembang dan bervariasi sejalan dengan perkembangan arus wisatawan.

5) Prasarana (Infrastruktur)

Diperlukan infrastruktur yang memadai untuk mendukung pelayanan dan fasilitas pendukung. Selain mendorong pengembangan pariwisata, perluasan infrastruktur memberikan manfaat tidak langsung yang juga dapat dinikmati oleh penduduk setempat.

2.8 Kerangka konsep penelitian

Kerangka konseptual penelitian adalah kaitan atau hubungan antara konsep satu dengan konsep yang lainnya dari masalah yang ingin diteliti. Kerangka konsep didapatkan dari konsep ilmu/teori yang dipakai sebagai landasan penelitian (Setiadi, 2013).



Gambar 2. 1
Kerangka Konsep Penelitian
 Sumber: data diolah peneliti, 2024.